

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Setelah melakukan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah menyatakan lepas dari belenggu penjajahan meskipun pengakuan kedaulatan dari pemerintah kerajaan Belanda baru diterima pada 17 Desember 1949¹. Setelah masa transisi pasca pengakuan kedaulatan, Republik Indonesia memasuki babak baru dalam kehidupan bernegara. Pasca pengakuan kedaulatan secara de facto dan de jure Indonesia sudah dapat dikatakan sebagai sebuah negara merdeka dan sebagai sebuah negara yang merdeka, pemerintah mempunyai kewajiban menjamin hajat hidup masyarakatnya.

Setelah pengakuan kedaulatan dilakukan, Indonesia melakukan beberapa usaha memperbaiki kehidupan masyarakat Indonesia yang kacau dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Salah satu hal yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban menjamin hajat hidup masyarakatnya adalah dengan melakukan usaha pemenuhan kebutuhan. Dalam kehidupan masyarakat, memenuhi kebutuhan dalam hidup adalah sebuah keharusan. Kebutuhan hidup manusia terdiri berbagai macam tingkatan. Kebutuhan dasar atau pokok merupakan hal yang paling utama atau wajib dipenuhi sebelum memenuhi kebutuhan lainnya. Abraham Maslow dalam teorinya hirarki kebutuhan menyebutkan :

¹ MC Riklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta : Serambi, 2008), hlm.467

“That people are motivated to achieve certain needs and that some needs take precedence over others. Our most basic need is for physical survival, and this will be the first thing that motivates our behaviour. Once that level is fulfilled the next level up is what motivates us, and so on”.²

Dalam teori hirarki kebutuhan pokok, kebutuhan fisiologi , kebutuhan akan rasa aman , kebutuhan akan aktualisasi diri , kebutuhan akan kasih sayang dan kebutuhan akan penghargaan adalah bagian dari teori hirarki kebutuhan.³ Sebagai bagian dari kebutuhan akan rasa aman , rumah dapat dikelompokkan sebagai salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Rumah memiliki peranan sebagai pelindung dan tempat bernaung dari cuaca (panas , hujan , kering ,lembab dan berangin) dan ancaman binatang buas.⁴ Sejalan dengan perkembangan waktu dan peradaban manusia rumah mengalami evolusi dalam bentuk maupun fungsinya. Rumah tidak lagi sekedar tempat berlindung bagi manusia tapi juga memiliki beberapa fungsi lainnya. Arti penting rumah bagi masyarakat pada umumnya, dapat dilihat dari fungsi atau manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari, yakni sebagai tempat tinggal, tempat bersosialisasi, tempat bersantai dan beristirahat, dan sebagai modal kehidupan yang tidak hanya bernilai sosial tapi juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi.⁵

Membangun rumah dan pemukiman untuk masyarakat menjadi salah satu tujuan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Pembangunan perumahan rakyat

² Abraham H. Maslow, *Motivasi dan Kepribadian* (Jakarta : PT.PBP, 1994), hlm.94

³ *Ibid.*, hlm.95

⁴ Rama Mangunjiwaya , *Fisika Bangunan* (Jogjakarta : penerbit KPG,1980), hlm .9

⁵ Suryanto Puspowardoyo, *Pembangunan Nasional dalam Perspektif Budaya* (Jakarta: Gramedia 1993), hlm. 126

merupakan sebuah masalah yang kompleks, karena didalam masalah ini akan menyangkut kedalam beberapa hal yaitu politik , ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan nasional. Kompleksnya masalah ini dikarenakan hakekat dan fungsi rumah yang sangat luas pemaknaannya dalam kehidupan manusia.⁶ Pentingnya perumahan dapat dilihat dalam GBHN yang menyebutkan bahwa perumahan merupakan sebagai kebutuhan dasar manusia disamping kebutuhan dasar lainnya seperti sandang, pangan , pendidikan , kesehatan dan lain-lain. Pembangunan perumahan diarahkan untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup dan memberi arah pada pertumbuhan wilayah, dengan memperhatikan keseimbangan antara pengembangan pedesaan dan perkotaan, memperluas lapangan pekerjaan, menggerakkan roda perekonomian dengan tujuan memberikan pemeratan kesejahteraan bagi rakyat.⁷

Pembangunan perumahan tidak dapat lepas dari pembangunan nasional, maka dari itu pembangunan perumahan juga harus masuk dalam poin pembangunan nasional. Salah satunya adalah dengan mengusahakan semua rakyat agar memiliki sebuah rumah yang layak untuk dihuni.⁸ Pembangunan perumahan yang layak dapat bersinergi dengan pembangunan infrastruktur lainnya yang menunjang kebutuhan masyarakat. Selain itu pembangunan perumahan rakyat juga harus menguntungkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah

⁶ C. Djemabut Blaang ,*Perumahan dan Pemukiman : sebagai Kebutuhan Pokok* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia , 1986) hlm .vii

⁷ Sjahrir , *Ekonomi politik kebutuhan pokok : Sebuah Tinjauan Prospektif*, (Jakarta : LP3ES, 1986), hlm.134

⁸ Cosmas Batubara, *Pokok-pokok Kebijakan Perumahan dan Pemukiman* (Jakarta, Yayasan obor Indonesia, 1986), hlm.3

(GMBR⁹) karena secara sosial-ekonomi golongan ini kurang memiliki daya beli yang kuat. Upaya pembangunan perumahan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah diatur dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).¹⁰ Kebijakan pembangunan pemukiman menitik beratkan kepada upaya peningkatan daya beli masyarakat dengan begitu pemerintah tidak hanya melakukan kebijakan untuk membantu masyarakat golongan rendah namun juga berusaha mengangkat daya beli masyarakat sehingga kedepannya beban subsidi pemerintah dapat dikurangi.

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang rendah membuat Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menyadari pentingnya untuk menjaga dan melindungi kebutuhan masyarakatnya.¹¹ Perumahan yang sehat dan nyaman bagi rakyatnya adalah salah satu cara untuk mencapai atau menjawab kewajiban Negara terhadap rakyatnya. Sebelumnya pemerintah Indonesia tidak memasukan perumahan sebagai program prioritas, dikarenakan saat itu pemerintah masih fokus dengan politik dengan sistem politik demokrasi parlementer yang memungkinkan kebijakan terhadap suatu proyek berubah beriringan dengan berubahnya susunan kabinet yang mengutamakan proyek berskala besar demi membangun citra politik indonesia sehingga pembangunan dan pengadaan perumahan belum bisa berjalan dengan baik.

⁹ GMBR adalah singkatan dari Golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

¹⁰ Siswono Judohusodo, *Rumah Untuk Semua Rakyat* (Jakarta : Kantor Menpera, 1991), hlm.2

¹¹ Yuni Suwanto dan Aris Santoso , *Ekonomi Rakyat: Antara Gagasan dan Realita* (Jakarta : Sekertariat Bina Dewa, 1995), hlm. 39

Upaya pemerintah dalam menjawab masalah usaha pembangunan perumahan tersebut adalah menggelar sebuah **Kongres Perumahan Rakyat**.¹² “**Kongres Rumah Sehat**” sebuah kongres mengenai pentingnya rumah sehat dan layak huni bagi masyarakat dilaksanakan di Bandung pada 25-30 Agustus 1950. Kongres ini dianggap sebagai titik awal dari pondasi usaha penyediaan perumahan bagi rakyat yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kongres ini secara garis besar membuat dasar-dasar peraturan terkait dengan bagaimana cara dan usaha menyelenggarakan kebijakan perumahan bagi rakyat diantaranya adalah:

- Perumahan sehat untuk peningkatan kesejahteraan.
- Merumuskan standar rumah minimum.
- Segera membentuk badan yang bertanggung jawab terhadap penyediaan perumahan rakyat yang terintegrasi dengan APBN.¹³

Dalam kongres di Bandung tersebut Moh. Hatta memberikan sebuah amanat yaitu “Satu Rumah Sehat Untuk Satu Keluarga”. Secara garis besar Bung Hatta telah mengamanatkan kepada masyarakat Indonesia, untuk secara bersama-sama menyelenggarakan pembangunan perumahan yang layak bagi rakyat yang telah hidup merdeka, beradab, dan bermartabat.¹⁴ Kongres perumahan rakyat di Bandung dapat dikatakan sebagai langkah awal bagi masyarakat Indonesia untuk melaksanakan pembangunan perumahan sesuai dengan amanat dan semangat dari pemimpin Negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya terutama dalam kategori perumahan.

¹² Siswono Judokusodo *Op.cit.*, hlm. 26

¹³ *Ibid.*, hlm. 105

¹⁴ catatan laporan Kongres Perumahan Rakyat Sehat di Bandung tanggal 25 Agustus 1950

Pembangunan sebuah kawasan perumahan tentu berkaitan dengan perancangan tata kota. Perancangan tata kota di beberapa kota besar dari NKRI yang masih menggunakan rancangan dari Thomas Nix dan Thomas Kartsen, membuat pembangunan perumahan hanya tinggal mengikuti letak atau tempat yang sudah ditentukan sebagai lokasi yang diperuntukan sebagai pemukiman rakyat.¹⁵

Setelah dilaksanakan kongres perumahan pertama di Bandung pada 26-30 Agustus 1950, kongres kedua membahas konsep perumahan kembali digelar di Jakarta. Kongres yang digelar pada tahun 1952 membahas beberapa poin terkait dengan keberlangsungan dari rencana pembangunan perumahan rakyat. Poin poin tersebut diantaranya 7

- Mentargetkan 12000 rumah dari Yayasan Kas Pembangunan (YKP) menangani pemabangunan perumahan di beberapa kota contohnya Malang dan Surabaya .
- Menargetkan ongkos produksi rumah yang murah sehingga dapat terjangkau untuk “kantong rakyat” .
- Mengusahakan kebijakan pendukung seperti pembangunan pabrik semen dan pembukaan hutan konsumsi yang dipergunakan sebagai bahan untuk pembangunan rumah:

Hal lain yang dibahas dalam kongres ini adalah peresmian sebuah badan yang bertanggung Jawab penuh terhadap perumahan rakyat dengan nama DJawatan

¹⁵ Bambang Eryudhawan dan Tjandra Mualim, *Kilas balik Perumahan Rakyat 1900-2000*, (Jakarta : Kementrian Perumahan Rakyat, 2010), hlm.79

Perumahan Rakyat yang ditetapkan melalui Kepres No.65/1952. Badan ini bekerja sama dengan Yayasan Kas pembangunan daerah untuk melaksanakan pembangunan perumahan rakyat ditingkat daerah . Kongres perumahan di Jakarta pada 1952 ini merupakan penguatan dari kongres pertama yang dilaksanakan di Bandung pada 1950. Hal ini memudahkan pemerintah untuk melangkah kedepan dalam menciptakan kebijakan perumahan yang membuat impian rakyat akan hunian yang berkualitas dengan harga terjangkau mungkin dapat menjadi kenyataan.

Kongres Perumahan dalam usaha penyediaan perumahan bagi rakyat dapat dianggap sebagai cara pemerintah melakukan implementasi atau pengamalan dari tujuan Negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu “**memajukan kesejahteraan umum**” dan juga sebagai implementasi dari sila ke 5 dari pancasila yaitu “**keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**”. Hal ini menjadi tanggung Jawab dari pemerintah Indonesia selaku pemangku kepentingan masyarakat. Selain menjadi tanggung Jawab menjalankan cita-cita bangsa juga dapat menjadi poin yang membanggakan dan semakin menguatkan martabat bangsa. Penyediaan rumah bagi rakyat secara garis besar juga tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya,

termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan”.¹⁶

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih dibawah standar hidup layak (cukup sandang , pangan, papan) serta ketidakstabilan politik dan keamanan dengan cepat akan menyebabkan terjadinya krisis kehidupan bagi masyarakat. Penyediaan perumahan rakyat bagi masyarakat diyakini sebagai solusi menjanjikan dan mumpuni untuk kembali meningkatkan angka kesejahteraan rakyat Indonesia. Maka dari itu disamping sebagai bentuk implementasi dari cita-cita negara yang menghendaki sebuah kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya maka pembangunan perumahan rakyat menjadi hal yang vital dan strategis untuk dilakukan.

Tabel pesebaran masyarakat kota-kota besar pulau Jawa yang telah memiliki rumah dan sudah termasuk rumah dinas pegawai (tahun 1949-1950).¹⁷

No.	NAMA KOTA	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH YANG TELAH MEMILIKI RUMAH
1	JAKARTA	±400.000	1500
2	SURABAYA	±350.000	TIDAK DIKETAHUI
3	MALANG	±200.000	900*
4	SEMARANG	±300.000	720*

¹⁶ Deklarasi Majelis Umum PBB 10 Desember 1948 tentang hak asasi manusia (HAM). Pasal 25 ayat 1.

¹⁷ Arsip Nasional Republik Indonesia, *Data pesebaran rumah masyrakat* (Jakarta : Arsip Nasional Republik Indonesia, 1999)

5	BANDUNG	±300.000	900
6	JOGJAKARTA	±400.000	500

Tabell.1 : Jumlah masyarakat yang telah memiliki rumah termasuk didalamnya rumah dinas

Pada dasarnya pembangunan sebuah perumahan harus juga melihat bagaimana dampak bagi masyarakatnya yang menetap diwilayah tersebut , misalkan dengan adanya perumahan rakyat maka akan ada peluang untuk menggerakkan kegiatan ekonomi dan sosial.¹⁸ Ketika dasar perumahan Indonesia disusun dalam kongres perumahan rakyat, taraf ekonomi Indonesia bisa dibilang memperhatikan hal ini dikarenakan berbagai faktor diantaranya ,pengeluaran selama perang dan perundingan dalam usaha pengakuan kedaulatan , ketidakmampuan masyarakat untuk bersaing dan juga masih adanya gejolak politik dalam negeri.¹⁹

Kondisi sosial ekonomi yang kurang kondusif berpengaruh pada perencanaan pembangunan perumahan rakyat kedepannya. Kondisi sosial politik dan ekonomi yang belum stabil akan menyulitkan untuk melakukan sebuah proyek jangka menengah-panjang seperti membangun perumahan rakyat. Maka dari itu dituntut untuk adanya kestabilan dibidang sosial , ekonomi maupun politik dalam rangka mengadakan usaha pembangunan perumahan.²⁰

Masalah perumahan rakyat dipilih sebagai topik penelitian skripsi ini dikarenakan masih kurangnya pembahasan secara menyeluruh terkait

¹⁸ Suparno Sastra M dan Endy marlina, *Perencanaan dan Pembangunan perumahan: Konsep, Strategi ,dan pedoman perencanaan dan pengembangan perumahan* , (Yogyakarta : ANDI, 2006), hlm.12

¹⁹ Dwight Y , “Penelitian Empiris dan pendekatan-pendekatan ekonomi politik” , *Prisma* No.3 (1989), hlm .47-51

²⁰ Bambang Eryudhawan dan Tjandra Mualim, *Kilas balik Perumahan Rakyat 1900-2000*, (Jakarta : Kementrian Perumahan Rakyat ,2010), hlm.134-135

pembangunan perumahan rakyat dan berbagai kebijakan yang mengatur penyelenggaraan perumahan rakyat. Selain itu, dalam membahas masalah dalam topik ini memunculkan beberapa aspek tersebut antara lain kondisi masyarakat ketika pembangunan perumahan rakyat dicetuskan, proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait perumahan rakyat. serta dampak dari aspek ekonomi dan sosial yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan rakyat. Aspek-aspek tersebut ibarat sebuah benang merah yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dilepaskan dalam pembahasan mengenai perumahan rakyat .

Pertama terkait kondisi struktur masyarakat Indonesia di masa pengakuan kedaulatan sampai demokrasi liberal. Ketika kita ingin membahas masalah perumahan di Indonesia kita tidak boleh melupakan kondisi struktur masyarakat pada masa itu terkhusus di wilayah pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan dari NKRI. Terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian diantaranya golongan masyarakat Jawa yang masih hidup dalam garis kemiskinan, masih kuatnya akar budaya masyarakat Jawa terkait sistem pertanahan dan sebagian masyarakat yang masih mengungsi semasa perang dengan belanda.

Dinamika di dalam penyusunan kebijakan perumahan rakyat menjadi aspek berikutnya yang membuat masalah ini menarik diteliti. Konsep perumahan rakyat secara gambalang telah di jelaskan diatas sesuai dengan hasil kongres rumah sehat di Bandung pada 1950. Hasil kongres di Bandung lalu menjadi dasar kongres ke 2 di Jakarta pada 1952 yang membahas kelanjutan dari konsep yang sudah tertuang dalam kongres di Bandung. Dinamika tak hanya terjadi pada seputar konsep

perumahan, kebijakan yang menjadi tindak lanjut juga menarik, posisi pemerintahan yang mengadopsi sistem demokrasi liberal yang menjadikan panggung politik bagaikan arena pertempuran, membuat setiap partai ingin mengambil peran sebagai pemangku kekuasaan dalam pemerintahan. golongan seperti Masyumi, nasionalis dalam PNI, dan golongan “sayap kiri” berusaha saling jejal demi mendapatkan kekuasaan yang mengakibatkan jalannya pemerintahan sebuah kabinet bisa berhenti di tengah jalan karena adanya Mosi tidak percaya. Selain itu di pemerintahan yang tidak stabil akibat seringnya pergantian tampuk pemerintahan mengakibatkan usaha penyediaan perumahan tidak bisa dijalankan secara maksimal mengingat bahwa proyek seperti perumahan merupakan proyek jangka menengah-panjang dan memerlukan perencanaan yang matang.

Terakhir adalah terkait perkembangan perumahan dan dampaknya dalam segala aspek kehidupan masyarakat terutama dalam aspek ekonomi dan sosial dengan dibangunnya sebuah perumahan dan terdapat beberapa aspek yang akan terbangun. Sebagai perumpamaan bahwa dari dibangunnya sebuah perumahan akan timbul sebuah kelompok masyarakat (*Society*) dan juga tercipta sebuah jaringan antara satu individu dan individu lainnya. Pembangunan pemukiman juga berdampak pada perekonomian. Dampak secara langsung yang dapat dirasakan adalah adanya kesempatan untuk membuka lapangan kerja baru dan munculnya peluang untuk mendirikan penyediaan usaha dan jasa. Sebagai contoh misalkan penyediaan layanan barang dan jasa yang strategis, seperti membuka toko

sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang bisa menjadi sumber pemasukan yang menjanjikan bagi pemilik usaha.

Masalah tentang pembangunan perumahan sudah beberapa kali diteliti dan dibukukan oleh kementerian perumahan rakyat. Buku pertama yang membahas secara khusus tentang perumahan rakyat adalah buku *Kilas balik Perumahan Rakyat 1900-2000*. Buku tersebut memberikan penjelasan terkait perkembangan perumahan rakyat dari era kolonial Belanda sampai era modern tepatnya reformasi.

Lalu buku *Rumah untuk semua rakyat* yang ditulis oleh Siswono Judokusodo, buku tersebut lebih membahas terkait dengan perumahan tetapi juga menjelaskan pengaruh perumahan yang dibangun terhadap perekonomian masyarakat, lalu ada buku dari Djemabut Blaang dengan judul *Perumahan dan pemukiman* yang menceritakan perihal kondisi ideal dari perumahan dan kondisi ideal dari lingkungan pemukiman masyarakat berdasarkan golongan yang tercipta didalam masyarakat.

Cosmas batubara selaku pejabat menteri perumahan rakyat juga pernah menulis buku berjudul *Pokok pokok kebijakan perumahan dan pemukiman*, yang memuat hal hal strategis dari usaha penyediaan perumahan rakyat dan pentingnya perumahan bagi rakyat Indonesia. Selain itu terdapat jurnal yang membahas tentang perumahan rakyat di Indonesia. Semisal jurnal berjudul *Rent House* dari IndoHousing yang membahas segala macam hal tentang perumahan dimulai dari lingkungan rumah, peluang investasi dan lain hal sebagainya. Selain itu dalam

IndoHousing terdapat beberapa artikel lain yang membahas perubahan kebijakan perumahan dari mulai pembangunannya yang ditanggung penuh oleh pemerintah, sampai munculnya peran swasta dalam rangka penyediaan perumahan rakyat. Maka dari itu penelitian skripsi ini ingin membahas secara spesifik tentang kiprah perumahan rakyat dengan menggunakan pandangan ekonomi dan sosial.

Perbedaan antara karya-karya di atas dengan penelitian skripsi ini terletak di perbedaan pendekatannya. Penelitian skripsi ini ingin mengedepankan pendekatan deskriptif analisis aspek ekonomi dan sosial dari pembangunan perumahan rakyat menggunakan teori kebutuhan pokok. Berdasarkan pemaparan diatas, maka dari penelitian ini kita dapat mengetahui bahwa pentingnya peran perumahan rakyat untuk diperjuangkan keberadaannya karena pengadaan perumahan rakyat merupakan salah satu dari usaha pelaksanaan dan pengamalan cita-cita bangsa juga sebagai pengalaman dari Pancasila. Sebagai Negara yang baru merdeka, ketahanan nasional dan kesejahteraan rakyat menjadi hal pokok yang dibutuhkan pemerintah sebagai alat penguat legitimasi kekuasaan. Ketika rakyat terpuaskan kebutuhannya maka pemerintahnya akan mendapatkan kepercayaan dari rakyat.

Selain melakukan pengkajian dengan menggunakan sumber pustaka, penulis juga telah melakukan serangkaian wawancara dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Diantaranya adalah Humas dari PT. Perumnas dan bagian litbang perumahan dari Kementrian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (KEMENPUPR)

Alasan lain dari penulis untuk memilih ini karena pada periode tersebut (1950-1977) adalah langkah awal dari usaha pemerintah dalam menyediakan perumahan bagi masyarakat. Masyarakat dimaksud peneliti disini adalah golongan masyarakat berpenghasilan rendah (menengah-kebawah).

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Konsepsi perumahan rakyat yang telah tersusun dalam kongres rumah sehat di Bandung pada 25-30 Agustus 1950 perlu diperjuangkan agar dapat memberikan batasan atau standar yang jelas terkait dengan perumahan rakyat . Dalam hal ini usaha penyelenggaraan perumahan rakyat yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan membentuk badan Jawatan perumahan dan membentuk beberapa peraturan pemerintah (PERPU) sebagai alat legalitas dari pelaksanaan perumahan rakyat.

Periode penelitian yang dilakukan dimulai pada tahun 1950 dimana konsep perumahan rakyat mulai dirancang dalam kongres rumah sehat di Bandung tahun 1950, pelaksanaan dan berbagai macam problematikanya sampai dibangunnya proyek perumahan era Orde Baru yang diberi nama proyek Perumahan Nasional pada tahun 1977.

Penulis membatasi periode kajian dari tahun 1950 sampai tahun 1977. Penulis beralasan bahwa dasar pembangunan perumahan rakyat sebenarnya telah dimulai pada 1950 dengan adanya kongres rumah sehat di Bandung dan baru bisa memberikan solusi yang cukup

memadai dengan terlaksananya pembangunan proyek Perumahan Nasional era pemerintahan Orde Baru pada periode 1977. Maka dari itu Penulis membatasi periode kajian dari tahun 1950 sebagai awal dan 1977 sebagai akhir.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dasar pemikiran dan masalah penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang saya ajukan untuk proposal penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan dan mewujudkan terciptanya perumahan yang sehat dan layak bagi rakyat?
2. Mengapa sampai pembangunan PERUMNAS pemerintah belum bisa memberikan solusi yang konkret dalam hal pengadaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terkait pada kiprah pemerintah bersama rakyat dalam usaha penyelenggaraan perumahan bagi rakyat yang merupakan sebuah cita-cita dan kewajiban bagi Negara selaku pelindung dari rakyat. Hal tersebut dilakukan karena pembahasan tentang perumahan rakyat memiliki beberapa aspek dan posisi rumah rakyat ini

terintegrasi terhadap beberapa bidang dalam kehidupan bangsa seperti, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Penulis juga berharap hasil dari penelitian ini nantinya dapat bermanfaat sebagai dalam pengembangan sumber kajian sejarah mengenai perumahan di Indonesia, khususnya bagi mahasiswa prodi pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini juga diharapkan nantinya dapat menjadi bahan penelitian lanjutan mengenai kajian kesejarahan terkait perumahan rakyat Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini meskipun tidak melahirkan suatu teori baru berkaitan dengan pembangunan perumahan rakyat, paling tidak temuan penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi peneliti sejarah dan pembelajaran sejarah.

- Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun di Universitas.

D. Metode Penelitian dan Sumber

1. Metode Penelitian

Metode penelitian/penulisan skripsi ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari 4 tahap yaitu :

1. Pengumpulan Obyek/Sumber
2. Verifikasi/Kritik Sejarah
3. Penyimpulan Kesaksian/Interpetasi
4. Penyusunan Kisah/Penulisan²¹.

Tahap awal dari penelitian skripsi ini adalah penulis menentukan topik apa yang dipilih untuk menjadi tema penelitian. Penulis memilih topik perumahan rakyat dikarenakan penulis memiliki ketertarikan dengan usaha penyediaan perumahan, dikarenakan sebelumnya penulis pernah tinggal dikawasan yang berbatasan langsung dengan proyek perumahan. Selanjutnya penulis melakukan pengumpulan sumber (Heuristik). Pengumpulan sumber yang dilakukan diawal adalah mengumpulkan sumber- sumber sekunder sebagai sumber penulisan. Sumber-sumber sekunder seperti buku ataupun jurnal ataupun artikel yang terkait dengan perumahan sudah terdapat di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta , Perpustakaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Perpustakaan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian skripsi ini juga menggunakan sumber-sumber sekunder tambahan di Perpustakaan Universitas Indonesia dan Perpustakaan Kementerian

²¹ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 18.

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memperdalam kajian pustaka. Sumber primer yang mendukung pembahasan tentang perumahan rakyat adalah sebuah Laporan dalam bentuk buku yang berisi intisari dari kongres perumahan sehat di Bandung tahun 1950 sebagai pondasi awal kebijakan perumahan rakyat. Sumber-sumber primer seperti koran, laporan rapat ataupun surat-surat penting milik Pemerintah terkait dengan salinan peraturan dan lain-lain telah didapatkan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan bagian Arsip Koran-koran lama Perpustakaan Nasional RI. Tahap kedua yang dilakukan adalah verifikasi data. Bahan-bahan penulisan yang sudah didapatkan dan terkumpul dari berbagai sumber akan dikaji dan dikritik baik secara intern maupun ekstern dalam rangka untuk memastikan keaslian serta keakuratan data yang terdapat dalam bahan-bahan penelitian skripsi ini. Selanjutnya adalah interpretasi data dalam rangka menafsirkan berbagai sumber yang telah diuji keakuratannya untuk selanjutnya akan masuk ke tahap terakhir yaitu historiografi. Di tahap terakhir ini data-data yang sudah melewati tahapan di atas akan ditulis secara ilmiah sehingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dan diuji.

2. Sumber

Sumber data yang menunjang penulisan proposal ini didapat dari buku-buku yang membahas tentang periode masa awal kemerdekaan Indonesia sampai Orde Baru secara umum dan khususnya buku-buku yang membahas perkembangan perumahan rakyat baik kebijakan dan lain sebagainya di masa demokrasi liberal sampai era Orde Baru. Buku yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini adalah *Kilas balik Perumahan Rakyat 1900-2000* yang diterbitkan

oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , *Rumah untuk semua rakyat* yang ditulis oleh Siswono Judokusodo, dan buku *Perumahan dan pemukiman* yang ditulis oleh Djemabut Blaang. Berikutnya untuk buku-buku penunjang lainnya yang ikut mendukung penelitian ini diantaranya adalah Suparno Sastra M dan Endy Marlina, *Perencanaan dan Pembangunan perumahan: Konsep, Strategi, dan pedoman perencanaan dan pengembangan perumahan* , catatan laporan Kongres Perumahan Rakyat Sehat di Bandung tanggal 25 Agustus 1950 , Yuni Suwanto dan Aris Santoso , *Ekonomi Rakyat: Antara Gagasan dan Realita* , Sjahrir , *Ekonomi politik kebutuhan pokok : Sebuah Tinjauan Prospektif* , Cosmas Batubara, *Pokok-pokok Kebijakan Perumahan dan Pemukiman*.